

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) DI DESA BUMI BERINGIN KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI

Eduardus Raja¹, Made Antara dan Haerul Anam²
edu.raja@yahoo.co.id

¹Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Wilayah Perencanaan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Community forest is a plantation forest in production forest that was developed by individuals or cooperatives to increase the potential and quality of production by implementing silviculture practices to ensure the sustainability of forest resources. The village of Bumi Beringin has gained a license for utilization of forest products in Community Forest by the Regent of Banggai (on behalf of the Minister of Forestry) covering 100 hectares, divided into 13 (thirteen) people who are members of forest farmers group Bersatu, but until now there is no implementation on the field due to the lack of strategies and right development patterns, so that there should be a research to obtain an appropriate development strategy in order for the the program development in Bumi Beringin Village can run good and right so as to improve the welfare of local communities. This research was conducted for 3 months starting in September 2015 until November 2015. The research was located in the Bumi Beringin Village, Luwuk Sub-district, Banggai District, Central Sulawesi. A strategy of community forest management development of forest farmers group Bersatu of Bumi Beringin village, Luwuk sub district, Banggai district is in quadrant II (2.45; 2.69) which means the diversification strategy of using strength to take advantage of opportunities or Strength-Treath Strategy (ST). The best pattern of community forest management development in Bumi Beringin Village, Luwuk Sub-district, Banggai District is a partnership pattern towards the Independence.

Keywords: *Strategy and Pattern of Community Forest Development in Bumi Beringin Village.*

Sektor kehutanan merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah sektor migas. Dilihat dari segi ekonomi hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Olehnya keberadaan hutan di Indonesia perlu dipertahankan dan dalam pengelolaan serta pemanfaatannya perlu memperhatikan aspek kelestariannya. Hutan juga dapat memberikan manfaat langsung maupun tak langsung bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini

Selain hal tersebut diatas hutan Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak dapat diabaikan. Sehingga konsep kelestarian hutan sekarang umumnya

mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. (Manurung, 2001) .

Sejalan dengan hal tersebut selanjutnya Lewoema dalam Sayuti (2012) menyatakan bahwa *sustainable forest management* atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang semula difokuskan untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi lingkungan yang rusak baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Sebuah nuansa baru pengelolaan kehutanan belum lama ini dimunculkan

pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Dalam bab 1 pasal 1: point 19 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 disebutkan Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan terobosan baru dalam mengentaskan kemiskinan penduduk di sekitar hutan. Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, mengindikasikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 220 juta orang. BPS menggambarkan bahwa kurang lebih 48,8 juta di antaranya tinggal di sekitar kawasan hutan dan sekitar 10,2 juta orang di antaranya tergolong dalam kategori miskin. Penduduk yang bermata pencaharian langsung dari hutan sekitar 6 juta orang dan sebanyak 3,4 juta orang di antaranya bekerja di sektor swasta kehutanan. Melihat data-data permasalahan tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan diantaranya mengajukan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan harapan bisa mengatasi permasalahan tersebut.

Senada dengan hal diatas sebagaimana Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2011, bahwa pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman rakyat harus memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dimana izin usaha tersebut diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang diberikan oleh Bupati (an. Menteri Kehutanan) kepada perorangan atau koperasi.

Selanjutnya Rimbun Daun (2011) menjelaskan bahwa karena kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada intinya adalah memberikan peluang kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan

hutan tanaman, atas : (1) *Akses legal*, yang diwujudkan dalam pemberian Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) yang diberikan oleh Bupati/Walikota atas nama Menteri Kehutanan; (2) *Akses ke lembaga keuangan*, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir yang difasilitasi oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman (Pusat P2H); (3) *Akses ke pasar*, yang diwujudkan dalam bentuk penetapan harga dasar penjualan kayu atau penetapan mekanisme harga dasar kayu oleh Menteri Kehutanan untuk menjaga stabilitas harga kayu hasil hutan tanaman rakyat.

Kebijakan Pemerintah tersebut dapat mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), menciptakan lapangan kerja baru (*pro-job*) dan ekonomi (*pro-growth*) sebagaimana tercantum dalam agenda revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, sekaligus juga merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan dalam Revitalisasi Sektor Kehutanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimana sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan lingkungan, mensejahterakan masyarakat dan memperluas lapangan kerja. (Adnan Ardhana dkk, 2012).

Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Banggai telah ada pencadangan areal untuk Hutan Tanaman Rakyat dengan luas \pm 665 Ha sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 132/Menhut-II/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang tersebar di beberapa Kecamatan. Pelaksanaan Program ini belum sampai pada tahap pengimplementasian di lapangan karena belum adanya pola pengembangan usaha pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat yang tepat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian *Strategi dalam Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan*

Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sehingga diperoleh pola yang tepat dalam mengimplemetasikan program tersebut.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sejumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang dengan rincian terdiri dari Anggota Kelompok Tani Hutan Bersatu di Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai sebanyak 13 (tiga belas) orang, Aparat Pemerintah Desa sebanyak 14 (empat belas) orang, Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang, Pegawai Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang dan Pegawai Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV Palu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang. Menurut Arikunto (2006) apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 orang yakni di peroleh 15 % dari 271 orang terdiri dari 13 orang Anggota Kelompok Tani Hutan Bersatu, sedangkan 28 orang lagi diperoleh dari Aparat Desa, Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai, Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan BP2HP Wilayah XIV Palu masing-masing 7 orang. Pengambilan sampel secara purposive sampling dilakukan dengan pertimbangan petugas yang dimaksud membidangi pengurusan perizinan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan Analisis SWOT dimana menurut Rangkuti (2005) SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan

strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis pada analisis SWOT seperti pada table berikut.

Tabel 1. Contoh Matriks Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	STRATEGI S – O	STRATEGI W – O
	Menggunakan Kekuatan Untuk Merebut Peluang	Mengatasi Kelemahan Untuk Merebut Peluang
Ancaman (T)	STRATEGI S – T	STRATEGI W – T
	Menggunakan Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman	Mengatasi Kelemahan Untuk Menghindari Ancaman

Selanjutnya tahap analisis dilakukan dengan mengevaluasi faktor internal dan eksternal pengembangan usaha pengelolaan hutan tanaman rakyat yang telah ditetapkan melalui matriks. Contoh matriks evaluasi faktor internal dan faktor eksternal seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) Dan Eksternal (EFE) Manfaat dan Resiko, Model dan Prospek Manajemen Konflik

Uraian Faktor Internal & Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Strength			
Variabel kekuatan 1	X11	Y11	X11Y11
Variabel kekuatan 2	X12	Y12	X12Y12
Sub Total (Strength)			
Weakness	Bobot	Rating	Skor
Variabel kelemahan 1	X21	Y21	X21Y21
Variabel kelemahan 2	X22	Y22	X22Y22
Sub Total (Weakness)			
Total IFAS			
Oportunity	Bobot	Rating	Skor
Variabel Peluang 1	X31	Y31	X31Y31
Variabel Peluang 2	X32	Y32	X32Y32
Sub Total (Oportunity)			
Threat	Bobot	Rating	Skor
Variabel ancaman 1	X41	Y41	X41Y41
Variabel ancaman 2	X42	Y42	X42Y42
Sub Total (Threats)			
Total EFFAS			

Keterangan :

X_{ij} : Bobot ke $ij = 1, 2$, dan

Y_{ij} : Bobot ke $ij = 1, 2$,

Dimana ;

i = Sub faktor (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)

j = Variabel dari sub faktor (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)

Berdasarkan matriks IFE dan EFE yang hasilnya disajikan pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa posisi internal dan eksternal strategi dan pola pengembangan usaha pengelolaan hutan tanaman rakyat, setelah membandingkan total skor yang diperoleh antara sub faktor kekuatan-kelemahan dan sub faktor peluang-ancaman.

Menurut Rangkuti (2005) kinerja dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Untuk dapat membandingkan antara perbandingan kekuatan dan kelemahan (diwakili garis horizontal) dengan perbandingan peluang dan ancaman (diwakili garis vertikal). Pada diagram tersebut

kekuatan dan peluang diberi tanda positif, sedangkan kelemahan dan ancaman diberi tanda negative. Dengan menempatkan selisih nilai S (kekuatan) – W (kelemahan) pada sumbu (x), dengan menempatkan selisih nilai antara O (peluang) – T (ancaman) pada sumbu (y), maka ordinat (x,y) akan menempati salah satu sel dari diagram SWOT. Letak nilai S – W dan O – T dalam diagram SWOT akan menemukan arah strategi yang akan ditempuh oleh suatu bentuk usaha seperti hutan tanaman rakyat. Gambar 1 menunjukkan berbagai kemungkinan strategi dan pola pengembangan usaha pengelolaan hutan

tanaman rakyat dan tipe strategi dan pola yang sesuai.



Gambar 1. Diagram SWOT (Rangkuti, 2005)

Posisi di kuadran 1 (*support on agresive strategy*) adalah situasi yang paling menguntungkan, dimana system pengelolaan mempunyai peluang dan kekuatan, jika system berada pada kuadran 2 (*support diversification strategy*), berarti system menghadapi ancaman akan tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal, jika system berada pada kuadran 3 (*support a turnaround oriented strategy*), berarti system tersebut mempunyai peluang yang besar tetapi dilain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan dan apabila system berada pada kuadran 4 berarti system menghadapi situasi yang paling tidak menguntungkan karena mempunyai ancaman dan kelemahan internal. Setiap kuadran pada diagram SWOT memperlihatkan ciri yang berbeda dari suatu unit usaha, sehingga diperlukan strategi yang berbeda pula dalam penanganannya. Selanjutnya menurut Sianipar dan Entang (2003), Analisis SWOT adalah suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi kedalam kategori kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), Ancaman (*threats*), sebagai dasar untuk menentukan tujuan, sasaran dan

strategi mencapainya, sehingga organisasi memiliki keunggulan meraih masa depan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di wilayah Kabupaten Banggai dilaksanakan atas dasar adanya SK Menteri Kehutanan No. 132/Kpts-II/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pencadangan Areal Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas ± 665 Hektar di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Dari luasan ± 665 Hektar tersebut, didalamnya sudah termasuk pencadangan HTR untuk wilayah Desa Bumi Beringin seluas ± 100 Hektar. Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 132/Kpts-II/2010 tersebut, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama instansi teknis terkait lainnya melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembentukan kelompok tani, pengusulan pertimbangan teknis oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai kepada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah XIV Palu sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) oleh Bupati Banggai (atas nama Menteri Kehutanan).

Di wilayah Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yang diterbitkan oleh Bupati Banggai (atas nama Menteri Kehutanan). IUPHHK-HTR tersebut diperuntukan kepada masyarakat perorangan yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan dengan nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Bersatu yang berada di wilayah Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai.

Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dilaksanakan dengan menggunakan 3 pola yakni :

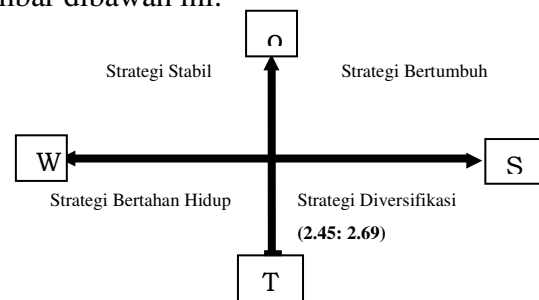
- Pola Mandiri, adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR.
- Pola Kemitraan, adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak.
- Pola Developer, adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dibangun oleh BUMN atau BUMS dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang ijin dan dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHKHTR diterbitkan.

Akan tetapi sampai pada tahap peneliti melakukan observasi belum ada implementasi pola pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang digunakan oleh Kelompok Tani Hutan Bersatu di Desa Bumi Beringin, sementara sosialisasi dari pihak terkait sudah dilakukan. Hal ini dikarenakan ; (a) terdapat perbedaan persepsi dalam menerjemahkan tujuan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) antara masyarakat dan dinas terkait; (b) asumsi yang digunakan oleh dinas terkait dalam menyusun kebijakan tersebut kurang sesuai dengan kondisi lapangan yang ada; dan (c) Ketidaksiapan para pemangku kegiatan (stakeholders) yang terdapat dalam struktur implementasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sehingga implementasi pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) belum berjalan sebagaimana tujuan HTR itu sendiri.

a. Analisis Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threats (SWOT)

Hasil penelitian Strategi Pengembangan Usaha dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten

Banggai setelah dianalisis menunjukkan, berdasarkan matriks IFE (*Internal Faktor Evaluation*) dan matriks EFE (*Eksternal Faktor Evaluation*), diketahui posisi internal dan eksternal Strategi dalam Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai berada dalam posisi kuadran II yakni (2.45: 2.69) seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2. Strategi dalam pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.

Gambar diatas menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kelompok Tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin berada pada Kuadran II atau Strategi Diversifikasi yakni mempunyai kekuatan tapi tetap menghadapi ancaman, sehingga strategi yang baik untuk diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, artinya bahwa kekuatan yang dimiliki oleh kelompok tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin seperti adanya Surat Keputusan IUPHHKHTR, adanya kelembagaan dan lokasi dari wilayah (status kawasan, pendampingan dan aksesibilitas) sangat jelas akan tetapi belum memiliki pola yang tetap untuk diterapkan. Hal ini menjadi ancaman bagi kelompok tani Hutan Bersatu dalam pengembangan hutan Tanaman Rakyat (HTR) di wilayahnya. Pengelolaan hutan Tanaman Rakyat di Desa Bumi Beringin memiliki Peluang sangat Penting dan perlu pola yang tepat dalam mengelolanya. Hal ini ditadai dengan peluang untuk dikembangkan berdasarkan total skor faktor kekuatan

internal sebesar 2,45 dan faktor peluang-ancaman dengan total skor 2,69.

Hal tersebut di atas mengartikan bahwa Kelompok Tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin memiliki peluang dan kekuatan untuk pengembangan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Perlu diketahui bahwa faktor internal sebesar 2,45 dan faktor eksternal 2,69 diperoleh dari total dari perkalian antara bobot dan rating dari masing-masing faktor.

Faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada Kelompok Tani Hutan Bersatu di Desa Bumi Beringin dapat dilihat dalam dalam tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kekuatan (<i>Streghts</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
1. Status Kawasan 2. Pendampingan 3. Aksesibilitas Yang Baik	1. Pola Mandiri 2. Pola Developer 3. Pola Mitra
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Ancaman (<i>threats</i>)
1. Sosio-Kultur Masyarakat 2. Pembukaan Lahan 3. Persepsi Masyarakat	1. Pemanfaatan belum jelas 2. Mitra 3. Nomenklatur

Selanjutnya setelah melihat faktor internal dan faktor eksternal hasil penelitian melahirkan beberapa strategi sebagaimana dalam matriks IFE dan EFE dalam analisis SWOT Strategi dalam Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Strategi SO, ST, WO dan WT tersebut dikembangkan berdasarkan hasil kajian internal dan eksternal yang berkaitan dengan Strategi Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang terpilih bagi masyarakat yakni strategi SO yang

dikembangkan mengingat strategi tersebut memiliki kekuatan dan peluang sehingga melahirkan berbagai strategi diantaranya: 1) mempertahankan status kawasan; 2) Meningkatkan frekuensi pembinaan kepada masyarakat; 3) pemberdayaan dan peran serta masyarakat khususnya Kelompok Tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin. Selanjutnya strategi ST yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan adanya kekuatan dan ancaman dalam Strategi dalam Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Strategi yang dikembangkan adalah; 1) Membangun komitmen antara Kelompok Tani Hutan Bersatu dan Pemerintah; 2) Pembinaan Kelompok Tani Hutan Bersatu dalam menciptakan kesadaran dalam pengembangan Hutan Tanaman Rakyat; 3) Membangun kerjasama antara Kelompok Tani Hutan Bersatu, Pemerintah dan Stakeholder. Sementara strategi WO dikembangkan berdasarkan pada Strategi dalam Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang memiliki berbagai kelemahan namun masih memiliki peluang. Oleh karena itu strategi yang dikembangkan adalah; 1) Perencanaan program yang matang dalam penerapan pola pengembangan Hutan Tanaman Rakyat; 2) Peningkatan koordinasi multipihak; 3) Peningkatan sosialisasi berkelanjutan tentang pengembangan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Terakhir adalah strategi WT adanya berbagai kelemahan dan ancaman yang dimiliki dalam strategi dalam pengembangan usaha pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), strategi yang dikembangkan dalam kondisi ini adalah; 1) Membangun analisis tapak dan situasi dengan adanya program pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); 2) Penerapan kebijakan yang sesuai dengan setiap program; 3) Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Strategi-strategi diatas menunjukkan bahwa pengembangan dan pengelolaan

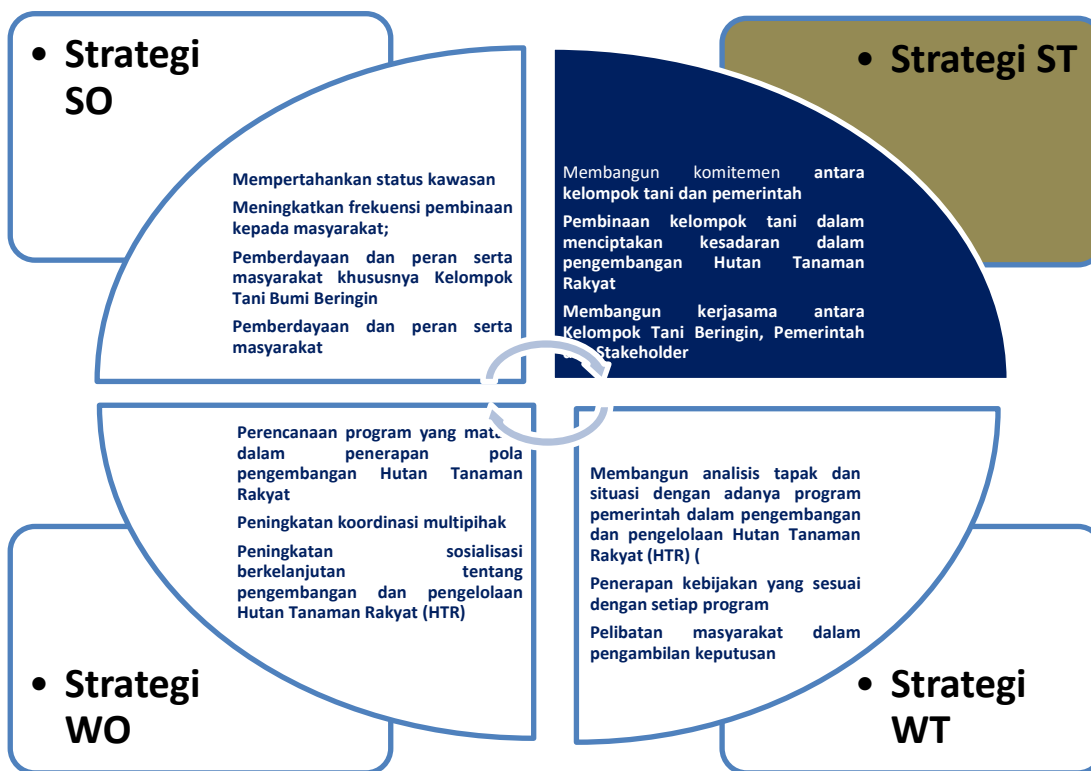
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) perlu diimplementasikan sehingga dapat diketahui hal apa saja yang bisa menjadi kekuatan dan peluang bagi Kelompok Tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin dalam mengelola tanaman yang mereka miliki dan apa saja yang menjadi alternatif –alternatif setiap permasalahan agar pengelolaanya menjadi lebih baik dan tentunya hal ini dapat menjadikan referensi bagi pemerintah sebagai acuan pengelolaan hutan tanaman rakyat kedepan. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Analisis SWOT Strategi Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

<div style="text-align: center;"> <div>IFE</div> <div> <div style="transform: rotate(-45deg); display: inline-block;">EFE</div> </div> </div>	Kekuatan (<i>Streghths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	Status Kawasan Pendampingan Aksesibilitas Yang Baik	Sosio-Kultur Masyarakat Pembukaan Lahan Persepsi Masyarakat
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
Pola Mandiri Pola Developer Pola Mitra	Mempertahankan status kawasan ($S_{1,2,3}$ & $O_{1,2,3}$). Meningkatkan frekuensi pembinaan kepada masyarakat; Pemberdayaan dan peran serta masyarakat khususnya Kelompok Tani Bumi Beringin $S_{1,2,3}$ & $O_{1,2,3}$ Pemberdayaan dan peran serta masyarakat khususnya Kelompok Tani Bumi Beringin ($S_{1,2,3}$ & $O_{1,2,3}$)	Perencanaan program yang matang dalam penerapan pola pengembangan Hutan Tanaman Rakyat ($W_{1,2,3}$ & $O_{1,2,3}$) Peningkatan koordinasi multipihak ($W_{1,3}$ & $O_{1,2,3}$) Peningkatan sosialisasi berkelanjutan tentang pengembangan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ($W_{1,2,3}$ & $O_{1,2,3}$)
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
Pemanfaatan belum jelas Mitra Nomenklatur	Membangun komitmen antara kelompok tani dan pemerintah ($S_{1,2,3}$ & $T_{1,2,3}$) Pembinaan kelompok tani dalam menciptakan kesadaran dalam pengembangan Hutan Tanaman Rakyat ($S_{1,2,3}$ & $T_{1,2,3}$) Membangun kerjasama antara Kelompok Tani Beringin, Pemerintah dan Stakeholder ($S_{1,2,3}$, & $T_{1,3}$)	Membangun analisis tapak dan situasi dengan adanya program pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ($W_{1,2,3}$ & $T_{1,2}$) Penerapan kebijakan yang sesuai dengan setiap program ($W_{1,2,3}$ & $T_{1,2,3}$) Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ($W_{1,2,3}$ & $T_{1,2,3}$)

b. Strenght-Treath (ST) Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai

Dalam mengimplementasikan strategi pengembangan usaha dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bumi Beringin berdasarkan hasil analisis ternyata yang perlu dilakukan adalah strategi ST yakni strategi strength-treath dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 3. Strategi SO;ST;WO;WT

1) Membangun Komitmen Antara Kelompok Tani dan Pemerintah

Pencadangan areal pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas \pm 665 Hektar di Kabupaten Banggai berdasarkan SK. 132/Menhut-II/2010, menjadikan dasar bagi Kelompok Tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin dalam mengelola Hutan Tanaman Rakyat (HTR), akan tetapi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tersebut belum dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Bersatu disebabkan karena belum adanya ketepatan pola pengelolaan apa yang akan diimplementasikan.

Dalam mewujudkan komitmen antara Kelompok Tani Hutan Bersatu dan pemerintah tentunya perlu ada yang memfasilitasi program pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bumi Beringin. Program-program yang dimaksud tentunya perlu pendampingan dari fasilitator baik teknis operasional lapangan maupun kelembagaan. Pendampingan yang dimaksud

adalah proses belajar bersama dalam mengembangkan hubungan kesejajaran, hubungan pertemanan atau persahabatan antara dua subyek yang dialogis untuk menempuh jalan musyawarah dalam memahami dan memecahkan masalah sebagai suatu strategi mengembangkan partisipasi masyarakat menuju kemandirian. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi lapangan yang selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas dan produktifitas masyarakat. Dengan demikian diharapkan dalam perjalanan pengembangan usaha pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin karena disaat kelompok tersebut menghadapi persoalan maka petugas pendamping dapat bersama-sama berdiskusi untuk mencari solusi dalam pengelolaannya.

2) Pembinaan Kelompok Tani Dalam Menciptakan Kesadaran Dalam Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Pembinaan Kelompok Tani Hutan Bersatu baiknya diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai, (1) kelas belajar setiap anggota untuk berinteraksi guna meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan, (2) sebagai wahana kerjasama, dan (3) Unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran serta unit jasa penunjang.

Selain itu pembinaan Kelompok Tani Hutan Bersatu juga diarahkan pada peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan agribisnis. Untuk mendukung Penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri perlu dilakukan : (1). pertemuan anggota/pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; (2). mempunyai rencana kerja kelompok yang disusun secara bersama berdasarkan kesepakatan; (3). memiliki aturan yang disepakati dan ditaati bersama; (4). mempunyai pencatatan atau administrasi; (5). sebagai sumber informasi teknologi bagi para anggotanya; (6). adanya jalinan kerjasama antar anggota dan antar kelompok dan kerjasama dengan pihak lain; (7). adanya pemupukan modal usaha dari iuran anggota atau penyisihan hasil usaha kelompok. Pembinaan ini dilakukan guna pengelolaan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dapat berkelanjutan.

3) Membangun Kerjasama Antara Kelompok Tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin, Pemerintah Dan Stakeholder

Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bumi Beringin di dukung sepenuhnya oleh pemerintah, kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kelompok tani maupun pemerintah. Mafaat-

manfaat tersebut Diantaranya adalah 1) mendukung ketersediaan bahan baku industri kayu; 2) Dinas Teknis dan Badan Penyuluh yang membidangi kehutanan perlu menyusun rencana pengembangan hutan tanaman rakyat; 3) meningkatkan sosialisasi tentang manfaat pengembangan hutan tanaman rakyat kepada aparaturn pemerintah dan masyarakat, terutama prosedur perizinan dan tata usaha hasil hutan; 4) meningkatkan kapasitas dan menambah jumlah penyuluh kehutanan dan tenaga pendamping didaerah dalam mendukung hutan tanaman rakyat; 5), meningkatkan inisiasi pembentukan kelembagaan kelompok tani hutan tanaman rakyat dan koperasi; 6) melakukan inventarisasi dan pemetaan hutan tanaman rakyat untuk mengetahui jenis dan sebaran tanaman hutan rakyat; 7) perlu dilakukan sosialisasi yang terkait dengan penataan hasil hutan lainnya hingga kepedesaan; 8) perlu dukungan ketersediaan benih (bibit) yang bersertifikat; 9) untuk menguatkan kemitraan kelompok tani hutan tanaman rakyat dengan mitra usaha.

Dengan adanya kerjasama menjadikan posisi tawar Kelompok Tani Hutan Bersatu lebih diperhitungkan dari kelompok lain. Kerjasama ini dilakukan agar mempunyai kelebihan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, serta mau berkorban untuk kemajuan kelompoknya.

b. Strategi Strenght-Treath (ST) Pengembangan Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Dalam Penerapan Pola Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, Kelompok Tani Hutan Bersatu di Desa Bumi Beringin masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi *diversifikasi*.

Dengan menggunakan strategi ini Kelompok Tani Hutan Bersatu berupaya untuk meraih peluang dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seperti pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dengan Pola Mandiri, Pola Kemitraan dan Pola Developer.

a). Pola Mandiri

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pola Mandiri, adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR. Masyarakat setempat membentuk kelompok, Pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah/Pemda.

b). Pola Kemitraan

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pola Kemitraan, adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah agar terselenggaranya kemitraan yang menguntungkan kedua pihak. Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar.

Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pola kemitraan ini minimal ada dua pihak yang bermitra, yaitu pihak perusahaan dan rakyat. Bahkan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pola mandiripun sangat penting bermitra dengan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memasarkan hasil panen Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tersebut. Perusahaan itulah yang mengolah hasil panen. Kegagalan pengembangan sektor kehutanan umumnya, karena belum jelasnya pemasaran produk kehutanan yang dikembangkan tersebut.

c). Pola Developer

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pola Developer, adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dibangun oleh BUMN atau

BUMS dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK- Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang ijin dan dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHKHTR diterbitkan.

BUMN/S sebagai developer membangun hutan tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR dan selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit. Jenis tanaman pokok yang bisa dikembangkan berupa tanaman hutan berkayu sejenis, atau tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu atau jenis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (pasal 7 permenhut No. 55 tahun 2011 jo. P. 31 tahun 2013). Tanaman hutan berkayu, antara lain (1) kayu pertukangan (meranti, jati, sengon, mahoni, dll); dan (2) kayu serat (gmelina, akasia, dll). Tanaman budidaya tahunan berkayu adalah jenis MPTS, antara lain: karet, nangka, kemiri, rambutan, mangga, dll. Persentase komposisi jenis tanaman adalah tanaman hutan berkayu (70%) dan tanaman budidaya tahunan berkayu (30%). Komposisi ini tidak termasuk kegiatan tumpangsari tanaman semusim.

Berdasarkan penjelasan ketiga pola pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di atas, dan sesuai hasil focus group diskusi (FGD), masyarakat menginginkan agar pola yang memungkinkan untuk dikembangkan pada kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bumi Beringin adalah Pola Mandiri. Penerapan pola ini dipilih oleh masyarakat karena masyarakat secara sadar agar tidak ada intervensi dari pihak mitra dan tidak terbebani dengan pinjaman dalam mengelola Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Akan tetapi jika melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Bumi Beringin

belum memungkinkan untuk mengembangkan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan menggunakan pola mandiri meskipun keinginan masyarakat cenderung lebih memilih pola tersebut. Pengembangan pola yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa Bumi Beringin adalah mengkolaborasi antara Pola Kemitraan dan Pola Mandiri. Hal ini dilakukan agar dengan adanya pola kemitraan dapat melatih dan membuat masyarakat Desa Bumi Beringin pada akhirnya dapat mengembangkan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyatnya (HTR) untuk menuju kemandirian. Untuk mencapai maksud tersebut, langkah awal yang perlu dilakukan antara lain memperkuat kelembagaan dengan melibatkan fasilitator dalam memfasilitasi petani sehingga ada perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengembangkan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), tentunya dari petani yang belum tahu sampai pada petani memahami tentang pentingnya membangun Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan bermitra.

Bermitra atau Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan pola kemitraan yaitu adanya pihak perusahaan dan masyarakat. Mitra sebagai penyandang dana dalam memulai pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat bahkan sampai pada memasarkan hasil panen Hutan Tanaman Rakyat (HTR) tersebut. Perusahaan yang sebagai mitra itulah yang memfasilitasi dalam mengolah hasil panen sampai pada pasar. Selama ini kegagalan pengembangan sektor kehutanan umumnya adalah pemasaran produk kehutanan yang dikembangkan tersebut.

Dalam menyukseskan hal tersebut Kelompok Tani Hutan Bersatu perlu dilakukan pendampingan serta pembinaan dari petugas pendamping/penyuluh yang berasal dari Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan hasil penelitian ini maka kesimpulan yang dihasilkan:

1. Strategi pengembangan usaha pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Kelompok Tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai berada dalam posisi kuadran II yakni (2,45;2,69) artinya strategi diversifikasi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Angka 2,45;2,69 tersebut berada pada posisi strategi *Strength – Treath* (ST), sehingga strategi yang dikembangkan adalah ; 1) Membangun komitmen antara kelompok tani dan pemerintah; 2) Pembinaan kelompok tani dalam menciptakan kesadaran dalam pengembangan Hutan Tanaman Rakyat; 3) Membangun kerjasama antara Kelompok Tani Hutan Bersatu Desa Bumi Beringin, Pemerintah dan Stakeholder.
2. Pola pengembangan usaha pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai yang baik adalah Pola Kemitraan menuju kemandirian.

Rekomendasi

1. Strategi pengembangan usaha pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) perlu disosialisasikan baik di tingkat tapak maupun pemerintah.
2. Strategi pengembangan usaha pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dihasilkan penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk dimasukan/ dintegrasikan ke dalam rencana kelola jangka panjang dan operasional pengelolaan HTR serta rencana regional/sektoral di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pola Kemitraan menuju kemandirian, menjadi pola alternatif dalam

pengembangan dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Banggai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ir. Made Antara, M.P. dan Dr. Haerul Anam, S.E., M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam proses pembimbingan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Ardhana dan Dian Cahyo Buwono: website: <http://oreibanjarbaru.or.id/wp-content/uploads/2012/1011/Hal.47-60.doc>).
- Arikunto S, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit Rineka Cipta.Jakarta.
- Daun, Rimbun. 2011, *Perizinan Hutan Tanaman Rakyat Tidak DipungutBiaya*. website: <http://nur.comuv.com/perizinan-hutan-tanaman-rakyat-tidak-dipungut-biaya>.
- Manurung 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Penerbit Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang *Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman*.
- Pamflet Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat* Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Rangkuti, F. 2005. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sayuti 2012.. *Analisis factor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi perkembangan agribisnis hutan rakyat di kecamatan kandang kabupaten temanggung*. eprints.undip.ac.id
- Sianipar, J.P.G dan Entang, H.M., 2003. *Teknik-Teknik Analisis Manajemen*. Bahan Ajar Diklat PIM Tingkat III. Edisi Revisi I, Cetakan Kedua. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 *tentang Kehutanan*.